



LAPORAN KINERJA | 2021

INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Inspektorat disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Inspektorat berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Inspektorat Kinerja Inspektorat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2021.

Jember, Januari 2022
Inspektur Kabupaten Jember

RATNO C. SEMBODO, S.H.
Pembina
NIP. 19740827 200501 1 006

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
A. RENCANA STRATEGIS	4
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	6
C. PERJANJIAN KINERJA	9
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	12
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2021	14
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	13
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	25
BAB IV. PENUTUP.	31
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2021 (jika ada)	

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
A. RENCANA STRATEGIS	4
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	6
C. PERJANJIAN KINERJA	9
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	12
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2021	14
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	13
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	25
BAB IV. PENUTUP.	31
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2021 (jika ada)	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jember.

Kinerja Inspektorat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran

strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2021

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Jember adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Jember
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Jember dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 34 tahun 2016 sebagai berikut :

- 1) Inspektorat merupakan unsur pengawas
- 2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 3) Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- 4) Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

5) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan
 - 2. Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Inspektorat Kabupaten Jember merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan;
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

2. Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Jember

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 16 Yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penguatan kelembagaan desa.

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan1 : Mengurangi Dan Mencegah Penyimpangan, Mengamankan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Serta Meningkatkan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku

Dengan Sasaran :

1. Efektifitas Pengawasan
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD
3. Penguatan Aksi Pencegahan Korupsi

Tujuan 2 : Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Dengan Sasaran :

1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Inspektorat menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tujuan 1, Sasaran 1

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

STRATEGI :

Mengadakan evaluasi secara aktif atas sistem manajemen pengawasan untuk meningkatkan kinerja

KEBIJAKAN :

Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Aksesibel yang didukung dengan sistem Reward dan Punishment secara adil

➤ **Tujuan 1, Sasaran 2 dan Sasaran 3**

STRATEGI :

Optimalisasi asistensi dan pendampingan pada OPD

KEBIJAKAN :

Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Aksesibel yang didukung dengan sistem Reward dan Punishment secara adil

➤ **Tujuan 2, Sasaran 1**

STRATEGI :

Peningkatan profesionalisme, kapasitas, dan kapabilitas aparatur pengawasan

KEBIJAKAN :

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pengawasan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target

sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

- Efektifitas Pengawasan

Indikator Kinerja :

1. Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang
2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan
3. Persentase kasus pengaduan yang terselesaikan

- Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD

Indikator Kinerja :

Persentase OPD dengan nilai SAKIP kategori baik

- Penguatan aksi pencegahan korupsi

Indikator Kinerja :

Persentase OPD yang mendapat predikat Zona Integritas

- Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Indikator Kinerja :

1. Level IACM
2. Persentase SOP/Juknis yang terselesaikan
3. Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2021 sebanyak 2 (dua) program utama yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator Program :

1. Prosentase OPD yang melaksanakan Manajemen Resiko
 2. Prosentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti :
 - Audit, Reviu & Evaluasi
 - Pengawasan dengan tujuan tertentu
- b. Program Perumusan Kebijakan ,Pendampingan dan Asistensi Dengan Indikator Program Prosentase OPD dengan Nilai sapik kategori baik

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat selama Tahun 2021 sebanyak 4(empat)kegiatan yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri kegiatan-kegiatan :
 1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Indikator Kegiatan (output/keluaran) :Jumlah LHP yang dilakukan Audit
 2. Kegiatan :Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan Indikator Kegiatan:
 - Jumlah rekomendasi kerugian yang ditindaklanjuti
 - Jumlah kasus yang terselesaikan
- b. Program Perumusan Kebijakan ,Pendampingan dan Asistensi terdiri kegiatan-kegiatan :
 1. Kegiatan :Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
Indikator Keluaran Kegiatan :Jumlah Dokumen Pedoman SOP yang terselesaikan
 2. Kegiatan :Asistensi dan Pendampingan
Indikator Keluaran Kegiatan :Jumlah OPD yang telah menerapkan SPIP

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Efektifitas Pengawasan	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang	5%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	95%
		Persentase kasus pengaduan masuk yang terselesaikan	95%
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Persentase OPD dengan nilai SAKIP kategori baik	100%

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Inspektorat Kabupaten Jember;

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional /Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Efektifitas Pengawasan	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang	$\frac{\text{Jumlah Jenis Temuan Tahun Berjalan yang sama pada tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah Jenis Temuan yang sama pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV	LHP
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Hasil Tindak Lanjut
	Persentase kasus pengaduan masuk yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Kasus Pengaduan Terselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus Pengaduan yang Masuk}} \times 100\%$	Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV	LHP Khusus
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP kategori baik	$\frac{\text{Jumlah OPD dengan Nilai Sakip Kategori Baik}}{\text{Jumlah SKPD yang Dievaluasi}} \times 100\%$	Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV	LHE
Penguatan aksi pencegahan korupsi	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK berdasarkan Penilaian Tim Penilai Nasional bentukan Kemenpan & RB	Sekretaris	Hasil Penilaian Kemen PAN & RB
Peningkatan Kapabilitas Aparat	Level IACM	Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP atau Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Sekretaris	Hasil Penilaian BPKP

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Persentase SOP/Juknis yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah SOP /Juknis Yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Target SOP /Juknis Yang Diterbitkan}} \times 100\%$	Sekretaris	Hasil Kebijakan Yang Dikelurkan
	Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah SDM APIP Yang Bersertifikat}}{\text{Total Jumlah SDM APIP Yang tersedia}} \times 100\%$	Sekretaris	Jumlah APIP Yang besertifikat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Inspektorat Kabupaten Jember dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Efektifitas Pengawasan	1	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang	5%	4,75 %	95 %
		2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	95%	95 %	100 %
		3	Persentase kasus pengaduan masuk yang terselesaikan	95%	95 %	100 %
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	1	Persentase OPD dengan nilai SAKIP kategori baik	100%	46,80 %	46,80 %

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 5 (Lima) indikator kinerja dari 4 (empat) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

I. **Tujuan** : Mengurangi Dan Mencegah Penyimpangan, Mengamankan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Serta Meningkatkan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku

Sasaran 1 :Efektifitas Pengawasan

- Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang
- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti
- Persentase kasus pengaduan masuk yang terselesaikan

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Efektifitas Pengawasan	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang	100%	95%	0%	100%	4,75 %
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	88%	85,73 %	0%	0%	95 %

		Persentase kasus pengaduan masuk yang terselesaikan	67 %	74,25 %	88,67 %	62,5%	95 %
--	--	---	------	---------	---------	-------	------

Kegiatan PKPT Desa Pengawasan Aplikasi Siswaskeudes 226 Desa (Indikator Penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang)



Kegiatan Tindak lanjut BPK-RI (Indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti)



Kegiatan Pemeriksaan Proyek Pekerjaan dinding penahan tanah di desa Jambesari Kec. SumberbaruPengawasan (Indikator Persentase kasuspengaduan masuk yang terselesaikan)



Kegiatan Saber Pungli (Indikator Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK)



PK sesuai renstra, selama 5 tahun periode renstra menunjukkan tren peningkatan yang fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan yang menunjang sasaran strategis. Antara lain melaksanakan pembinaan terhadap pengelola SAKIP dan RB OPD melalui kegiatan bimbingan teknis. Sosialisasi dan desk pendampingan pemenuhan data secara berkelanjutan di tahun-tahun sebelumnya masih belum optimal dikarenakan oleh faktor kebijakan eks-Bupati lama dan Faktor SDM yang kurang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Efektifitas Pengawasan	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang	5 %	4,75%	95%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	95 %	95 %	100%
		Persentase kasus pengaduan yang terselesaikan	95 %	95%	100%

SumberData:Data Pengumpulan LKIP pada ESR

Penjelasan table 3.3 : capaian realisasi tahun 2021 untuk indikator % Inspektorat Kabupaten Jember yang Menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan indikator % Inspektorat Kabupaten Jember yang Menyusun PK sesuai renstra, menunjukkan capaian rata-rata baik yaitu dengan 95 % dibandingkan target akhir renstra. Namun demikian adanya pencapaian salah satu indikator yang dinilai masih belum bisa terukur dikarenakan tidak adanya sumber data dan kurang optimalnya system penyusunan laporan, yang disebabkan belum optimalnya SOP penyusunan laporan dan perencanaan kinerja serta banyaknya pergantian personel di bidang perencanaan Inspektorat Kabupaten Jember yang tidak beiringan dengan peningkatan kompetensi personil pengganti.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Efektifitas Pengawasan	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang	4,75 %	-	

		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	95 %	100 %	Laporan Tindak Lanjut
		Persentase kasus pengaduan yang terselesaikan	95 %	95%	LHP dengan Pengaduan Yang Masuk

SumberData:

- <https://menpan.go.id/>
- <https://setjen.kemenkeu.go.id/>
- <https://www.bnpt.go.id/>

Penjelasan table 3.4 :realisasi indikator % Inspektorat Kabupaten Jember yang Menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan % Inspektorat Kabupaten Jember yang Menyusun PK sesuai renstra ada salah satu indikator yang tidak bisa dibandingkan dengan realisasi nasional karena tidak terdapat pengukuran secara nasional.

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **98.3%**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **cukup**.

1. Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang.

Capaian indikator persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang sebesar 4,75 % dikategorikan baik, adapun faktor yang masih menjadi penghambat diantaranya :

- Dampak pandemi covid-19, namun kegiatan rencana aksi tindak lanjut dan konsultasi kepada OPD masih dapat dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.
- Penetapan APBD yang terlambat
- Kurangnya jumlah SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- Penyesuaian system penganggaran sesuai regulasi yang baru (Permendagri 90 Tahun 2019 – Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)

Sedangkan faktor Pendukung, diantaranya :

- Jumlah Anggaran yang cukup
- Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam melakukan percepatan, baik percepatan kinerja maupun realisasi penyerapan.

2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti.

Capaian indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti sebesar **95 %** dikategorikan **Baik** namun hal ini perlu dioptimalkan lagi sehingga mendapatkan kategori **Sangat Baik**

3. Persentase kasus pengaduan yang terselesaikan

Capaian indikator Persentase kasus pengaduan yang terselesaikan

Sebesar **95 %** dikategorikan **Baik** namun hal ini perlu dioptimalkan lagi sehingga mendapatkan kategori **Sangat Baik**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1 Efektifitas Pengawasan** terdiri dari 2 (satu) program dan 3 (Tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

A. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a) Sub Kegiatan: Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Jumlah Anggaran	10.240.000	9.329.600	91.11%
Keluaran/Output	: Jumlah laporan obrik yang dipriksa	9 LHP	9 LHP	100%
Penjelasan	: Pelaksanaan pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan jumlah realisasi anggaran dan output jumlah laporan obrik yang diperiksa			

b) Sub Kegiatan: Pengawasan Desa

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Jumlah Anggaran	198.570.000	27.840.000	14.02%
Keluaran/Output	: Jumlah LHP Pengawasan desa yang diterima Obrik	226LHP	226 LHP	100%
Penjelasan	: Pelaksanaan Pengawasan Desa diukur dengan jumlah realisasi anggaran dan output jumlah LHP Pengawasan desa yang diterima Obrik			

c) Sub Kegiatan: Reviu Laporan Keuangan

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Jumlah Anggaran	49.895.000	45.500.000	91.19
Keluaran/Output	: Jumlah Laporan hasil reviu Keuangan dterima OPD/Obrik	9 LHP	9 LHP	100 %
Penjelasan	: Pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan realisasi anggaran dan output diukur dari Jumlah Laporan hasil reviu Keuangan dterima OPD/Obrik			

B. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan

a) Sub Kegiatan: Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Jumlah Anggaran	48.280.000	38.460.000	79.66
Keluaran/Output	: Jumlah laporan hasil pemantauan kerugian daerah terselesaikan	4 Laporan	4 Laporan	100 %
Penjelasan	: Pelaksanaan kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah diukur dengan realiasasi anggaran dan Jumlah laporan hasil pemantauan kerugian daerah terselesaikan			

b) Sub Kegiatan: Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Jumlah Anggaran	283.482.000	242.701.720	85.61
Keluaran/Output	: Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan tertentu	70 Laporan	70 Laporan	100 %
Penjelasan	: Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu diukur dengan realisasi anggaran dan realisasi Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan tertentu			

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/KotaKegiatan

d) Sub Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Jumlah Anggaran	600.208.300	514.764.709	85,76 %
Keluaran/Output	: Jumlah Laporan hasil reviu Keuangan dterima OPD/Obrik	8 Laporan	8 Laporan	100 %
Penjelasan	: Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan A diukur dengan Jumlah Laporan hasil reviu Keuangan dterima OPD/Obrik			

Sasaran 2 :Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD

- Persentase SKPD dengan nilai SAKIP kategori baik Persentase

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP kategori baik	2 %	1,47 %	39,13%	47 %	46,80 %

Sumber Data : LKHE Inspektorat & Lakip 2017 s.d 2020

Penjelasan table 3.4 : realisasi tahun 2021 untuk Persentase SKPD dengan nilai SAKIP kategori baik Persentase% Inspektorat Kabupaten Jember yang Menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan Persentase SKPD dengan nilai SAKIP kategori baik% Inspektorat Kabupaten Jember yang Menyusun PK sesuai renstra, selama 5 tahun periode renstra menunjukkan tren fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini ditunjang pelaksanaan kegiatan yang menunjang sasaran strategis. Antara lain melaksanakan pembinaan terhadap pengelola SAKIP dan RB OPD melalui kegiatan bimbingan teknis. Sosialisasi dan desk pendampingan

pemenuhan data secara berkelanjutan, tidak bisa terukur dikarenakan tidak adanya data

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja.s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Peningkatan akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP kategori baik	100%	46,80 %	

Sumber Data :

Penjelasan table 3.6 : capaian realisasi tahun 2021 untuk Persentase SKPD dengan nilai SAKIP% Inspektorat Kabupaten Jember yang Menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan Persentase SKPD dengan nilai SAKIP % Inspektorat Kabupaten Jember yang Menyusun PK sesuai renstra, menunjukkan capaian kurang yaitu 46,80 % dibandingkan target akhir renstra. Namun demikian pencapaian tersebut menunjukkan kurang optimalnya system penyusunan laporan, dan masih ada OPD yang belum optimal dalam melaksanakan realisasi Kinerja di masing masing perangkat daerah.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Peningkatan akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP kategori baik	46,80%	AA	

SumberData:

- <https://menpan.go.id/>
- <https://setjen.kemenkeu.go.id/>
- <https://www.bnpt.go.id/>

Penjelasan table 3.6 : realisasi indikator AArealisasi nasional yang menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan % Inspektorat Kabupaten Jember yang Menyusun PK sesuai renstra tidak dapat dibandingkan dengan realisasi nasional karena tidak adanya data sebagai pembanding dengan realisasi nasional

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD** terdiri dari 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) program sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a) Sub Kegiatan: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Jumlah Anggaran	9.520.000	9.304.960	97.74
Keluaran/Output	: Jumlah LHP yang dilakukan Audit	1LHP	1 LHP	100 %
Penjelasan	: Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah di dengan realisasi anggaran dan realisasi Jumlah Laporan H Pemeriksaan (LHP)			

b) Sub Kegiatan: Reviu Laporan Kinerja

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Jumlah Anggaran	83.995.000	54.363.000	64.72
Keluaran/Output	: Jumlah Laporan hasil reviu Kinerja diterima OPD/Obrik	4 LHP	4 LHP	4 LHP
Penjelasan	: Pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Kinerja diukur dengan realisasi anggaran dan realisasi Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)			

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Jumlah Anggaran	38.146.000	20.470.000	54 %
Keluaran/Output	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69 LHE	69 LHE	100%

Penjelasan	:	Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan realisasi anggaran dan realisasi Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
------------	---	---

3. Program Perumusan Kebijakan ,Pendampingan dan Asistensi
Kegiatan Asistensi dan Pendampingan

Sub Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

		Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	:	Jumlah Anggaran	208.040.000	203.069.600	97.61
Keluaran/Output	:	Jumlah laporan pendampingan dan Aistensi yang diterima obrik	4 Laporan	4 Laporan	100 %
Penjelasan	:	Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah diukur dengan realisasi anggaran dan realisasi Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)			

Sasaran 2 : Penguatan aksi pencegahan korupsi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja pada sasaran ke dua ini terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Perumusan Kebijakan ,Pendampingan dan Asistensi
Kegiatan Asistensi dan Pendampingan

Sub Kegiatan: Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

		Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	:	Jumlah Anggaran	253.730.000	202.858.000	79.95
Keluaran/Output	:	Jumlah laporan pendampingan dan Aistensi yang diterima obrik	6 Laporan	6 Laporan	100 %
Penjelasan	:	Pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan			

	Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diukur dengan realisasi anggaran dan realisasi Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
--	--

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Inspektorat Kabupaten Jembertahun 2021 adalah sebesar Rp. 8.163.824.338 yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi		Rp. 7.335.949.938
Belanja Pegawai	Rp. 5.041.591.539	
Belanja Barang/jasa	Rp. 2.294.358.399	
b. Belanja Modal		Rp. 827.874.400
- Belanja Modal....	Rp. 827.874.400	

Proporsi Anggaran pada tahun 2021, Belanja Operasi sebesar 90 % dan Belanja Modal sebesar 10 %

2. Alokasi Anggaran Belanja Per Program

Keseluruhan anggaran belanja langsung perprogram pada Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2021 terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.009.202.338	6.522.855.560	93,06
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.038.400	38.001.000	65,48
	a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.552.000	17.531.000	99,88
	b. Kooordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi Kinerja SKPD	2.340.400	-	0,00
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.146.000	20.470.000	53,66

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.217.591.539	4.729.251.484	90,64
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.882.891.539	4.412.283.884	90,36
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	334.700.000	316.967.600	94,70
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.580.000	85.729.680	80,44
a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	0,00
b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	106.580.000	85.729.680	80,44
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	600.208.300	514.764.709	85,76%
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	10.882.200	10.448.000	96,01
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	228.268.000	220.661.195	96,67
c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.850.100	33.360.570	95,73
d. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.680.000	7.939.215	58,04
e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.028.000	32.760.000	88,47
f. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.500.000	269.422.929	97,79
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	827.874.400	758.742.000	91,65
a. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	827.874.400	758.742.000	91,65
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	22.692.749	15.636.913	68,91
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	379.000	25,27
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.692.749	1.257.913	34,06
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000	14.000.000	80,00

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.216.950	132.983.839	75,47
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.705.950	24.037.466	65,49
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	103.327.500	62.527.673	60,51
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	36.183.500	46.418.700	128,29
		-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	683.982.000	427.499.280	62,50
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	352.220.000	146.337.560	41,55
a. Pengawasan Kinerja Pemerintah daerah	9.520.000	9.304.960	97,74
b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10.240.000	9.329.600	91,11
c. Reviu Laporan Kinerja	83.995.000	54.363.000	64,72
d. Reviu Laporan Keuangan	49.895.000	45.500.000	91,19
e. Pengawasan Desa	198.570.000	27.840.000	14,02
F. Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	-	-
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	331.762.000	281.161.720	84,75
a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	48.280.000	38.460.000	79,66
b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	283.482.000	242.701.720	85,61
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	470.640.000	409.892.400	87,09

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5.520.000	3.964.800	71,83
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	5.520.000	3.964.800	71,83
b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	-	-	-
2. Pendampingan dan Asistensi	465.120.000	405.927.600	87,27
a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	208.040.000	203.069.600	97,61
b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	3.350.000	-	0,00
c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	253.730.000	202.858.000	79,95
d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	-
JUMLAH	8.163.824.338	7.360.247.240	90,16

3. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

a. Untuk Sasaran Starategis I: **Efektifitas Pengawasan**

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Anggaran Rp. 683.982.000
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 7.009.202.338

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 7.693.184.338 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 94 % dari keseluruhan belanja langsung Inspektorat Kabupaten Jember

b. Untuk Sasasaran Strategis II: **Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD**

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Anggaran Rp.683.982.000
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 21.26.310.799
- Program Perumusan Kebijakan ,Pendampingan dan Asistensi dengan Anggaran Rp. 470.640.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 3.280.932.799 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Inspektorat Kabupaten Jember

c. Untuk Sasaran Strategis III: **Penguatan aksi pencegahan korupsi**

Didukung oleh :

- Program Perumusan Kebijakan ,Pendampingan dan Asistensi Dengan Anggaran Rp. 470.640.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 470.640.000 yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 14 % dari keseluruhan belanja langsung Inspektorat Kabupaten Jember

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) memperoleh nilai **85,45 %** dikategorikan **Baik** karena dari 4 (Indikator) indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 3 (tiga) indikator dalam kategori baik, dan 1 (satu) indikator dalam kategori Kurang.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.7.485.680.157 (92%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp.4.412.283.884 (87.52%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 3.073.396.273 (98%),

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Inspektorat Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Kurang Jumlah SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif
2. Sarana dan prasarana pemeriksaan

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Penambahan Jumlah SDM

2. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya educative seperti Bimbingan teknis, Diklat, Sosialisasi, Pendampingan dan Asistensi, Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), dsb
3. Pengadaan sarana dan prasarana pemeriksaan seperti ala-alat ukur dsb

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2022.